

**Legal Analysis Regarding The Implementation of Corporate Criminal
Liability Principle in Illegal Fisheries: Case Study on Court Decision
01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB**

Author:

Farros Dhaneswara¹ and Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M²

ABSTRACT

It is known that the defendant ZNL was the captain of the ship M.V. The Panama flagged Hai Fa was caught in Wanam by the authorities from the Directorate General of Surveillance and Control of Marine and Fishery Resources. The court decision 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB of this case raise several concerns and questions regarding the nature Corporate Criminal Liability in regard to Indonesian Fisheries Law. This legal research seeks to analyse to what extent corporate criminal liability can be applied in Fisheries cases.

This legal research applies doctrinal legal research method by means of a normative approach. The data contained within this legal research primarily revolve around judicial decisions, laws and regulation, as well as literatures to construct the analysis.

This legal research arrives at several conclusions that first, the corporate criminal liability in Indonesian Fisheries Law is limited to the management; second, it is possible to prosecute the management that is not caught red handedly, third, the application of corporate criminal liability in court decision 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB has not reached the optimum implementation of the law.

Keywords: Indonesian Fisheries Law, Court Decision 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB, Corporate Criminal Responsibility.

¹ Student of Criminal Law Concentration, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

² Lecturer and Legal Research Supervisor under Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Analisis Hukum mengenai Implementasi dari Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Indonesia. Analisis Putusan. 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB

Oleh:

Farros Dhaneswarai³ dan Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.⁴

INTISARI

Diketahui bahwa terdakwa ZNL adalah kapten kapal M.V. Haifa berbendera Panama. M.V. Hai Fa ditangkap di Wanam oleh pihak berwenang dari Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Putusan pengadilan 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB dari kasus ini menimbulkan beberapa kekhawatiran dan pertanyaan mengenai sifat Tanggung Jawab Pidana Korporasi terkait dengan UU Perikanan Indonesia. Penelitian hukum ini berupaya menganalisis sejauh mana teori tanggung jawab pidana perusahaan dapat diterapkan dalam kasus Perikanan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang terkandung dalam penelitian hukum ini terutama berkisar pada keputusan pengadilan, undang-undang dan peraturan, serta literatur untuk membangun analisis.

Penelitian hukum ini sampai pada beberapa kesimpulan bahwa pertama, tanggung jawab pidana korporasi dalam UU Perikanan Indonesia terbatas pada manajemen; kedua, adalah mungkin untuk menuntut manajemen yang tidak tertangkap tangan, ketiga, penerapan tanggung jawab pidana perusahaan dalam putusan pengadilan 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB belum mencapai implementasi hukum yang optimal.

Kata Kunci: Hukum Perikanan Indonesia, Putusan Pengadilan 01/PID.SUS/PRK/2015/ PN.AMB, Tanggung Jawab Pidana Korporasi.

³ Mahasiswi Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

⁴ Dosen and Dosen Pembimbing Skripsi di Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada